

GTD Bisnis dan HAM Jateng Diresmikan di Gedung Gradhika Bhakti Praja

Rizal Afif Kurniawan. - CILACAP.ARNESSIO.COM

Jan 2, 2024 - 11:49



SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana, melantik anggota Gugus Tugas Daerah (GTD) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur Jawa pada Kamis (28/12/2023). Salah satu yang diangkat adalah Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, sebagai sekretaris sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 180/173 tahun 2023 tentang GTD Bisnis dan HAM.

Selain Kakanwil Kemenkumham Jateng, anggota GTD Bisnis dan HAM Jateng juga melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng sebagai Wakil Ketua dan Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jateng sebagai Wakil Sekretaris. Anggota GTD ini mencakup Kepala Dinas terkait, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jateng, serta unsur dari korporasi dan akademisi.

Surat Keputusan tersebut menetapkan tugas GTD Bisnis dan HAM Jateng, termasuk menyusun rencana kerja hukum dan HAM, mengkoordinasikan serta menyelaraskan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di daerah, serta memantau dan melaporkan pelaksanaannya.

Kakanwil Kemenkumham Jateng, dalam sambutannya, merinci bahwa pembentukan GTD Bisnis dan HAM ini merujuk pada asas-asas Pedoman PBB tentang Bisnis dan HAM. Tejo menegaskan bahwa pemenuhan HAM tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga swasta, pelaku usaha, bisnis, dan korporasi.

Pj Gubernur Jateng menyampaikan bahwa Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi instrumen HAM internasional dan memiliki kewajiban melaporkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia. Gugus Tugas bertekad mendorong pelaku usaha dan korporasi untuk mematuhi ketentuan demi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM yang baik, mengedepankan nilai-nilai HAM dalam bisnis untuk manfaat masyarakat dan karyawan perusahaan.